

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Menciptakan Stabilitas Hegemoni pada Era Pasca Perang Dingin

Margi A. Hasyaimi

*Alumnus Program Studi Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: margihasyaimi@yahoo.com

ABSTRACT

The United States has a long history for its domination since the Second World War. The United States and its allies obtain a victory over Japan which capitulated after a bombing of Hiroshima and Nagasaki. With all the potential, the US began showing its role as a hegemon. Its superiority continuing through the establishment of international institutions such as GATT and the Bretton Woods system. The cold war marked by the presence of world competition in developing nuclear weapons and spreading of ideology that formed to be bipolar. The cold war ended with the fall of the Soviet Union and the US appeared as a sole power. In the aftermath of the cold war, US's ideology dominated international politics and economics. According to the hegemonic stability theory, the capacities of US's military, economic and political have the influence to affect other countries to follow its policies. The United States even able to intervene in any conflict even without UN approval.

Keywords: *Hegemon, Cold War, Hegemonic Stability Theory*

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam dominasinya sejak era Perang Dunia II. AS dan sekutunya memperoleh kemenangan atas Jepang yang menyerah setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. Dengan segala potensinya, AS mulai menunjukkan perannya sebagai negara hegemon. Superioritas AS dibuktikan melalui institusi internasional seperti GATT dan Bretton Woods system. Selama Perang Dingin, dunia diwarnai dengan adanya persaingan pengembangan senjata nuklir dan penyebaran ideologi sehingga sistem internasional yang terbentuk adalah bipolar. Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet dan AS keluar sebagai kekuatan Unipolar baru. Pada pasca Perang Dingin, AS dan ideologinya mendominasi ekonomi politik internasional. Berdasarkan Teori Stabilitas Hegemoni, AS memiliki kapasitas militer, ekonomi dan pengaruh politiknya mampu mempengaruhi negara lain agar mengikuti kebijakannya. AS bahkan mampu melakukan intervensi dalam berbagai konflik meskipun tanpa persetujuan PBB.

Kata Kunci: *Hegemon, Perang Dingin, Teori Stabilitas Hegemoni*

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin Jerman dan bubarnya Uni Soviet karena kealahannya terhadap Amerika Serikat dengan sistem kapitalisnya. Persaingan antara dua kekuatan telah dimenangkan oleh AS sehingga mengukuhkan posisinya sebagai negara *Superpower*. Pada saat itu, pasar-pasar kapitalis mulai terbuka dan globalisasi atau pergerakan cepat dari sumber daya, manusia dan perdagangan bebas menjadi prinsip yang mendominasi dunia. Globalisasi seringkali dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika menjadi perusahaan transnasional dan mulai beroperasi diberbagai negara di

seluruh dunia. Kekalahan sistem komunis Soviet semakin membuat Amerika menjadi kekuatan unipolar (History Blueprint 2013). Sebenarnya, kekuatan AS sudah mendominasi sejak Perang Dunia II berakhir. Banyak beberapa studi kasus tentang kebijakan luar negeri AS yang menggambarkan posisinya sebagai pahlawan yang selalu hadir untuk membantu negara lain, misalnya melalui intervensi militer dengan PBB di Perang Korea tahun 1950-an, bantuan asing untuk pembangunan ekonomi di Jepang dan Korea Selatan, perang Vietnam, dsb. Pada era Perang Dingin terdapat dua kekuatan besar yang berusaha mendominasi. AS dan Soviet saling bersaing dengan mengembangkan kekuatan militer, dukungan dana, dan saling menyebarkan ideologi. Ketika perang tersebut berakhir, maka kekuatan dominan yang tersisa yaitu AS dan ideologi kapitalismenya semakin membuktikan potensinya sebagai negara hegemon. Lalu bagaimanakah kebijakan luar negeri AS sebagai negara *Superpower* pada pasca Perang Dingin? Untuk menganalisa posisi AS dalam implementasi kebijakan luar negerinya di era Pasca Perang Dingin tersebut, penulis menggunakan teori stabilitas hegemoni untuk menjelaskan kapabilitas dan perilaku dari AS yang cenderung bertindak sebagai pahlawan dalam berbagai permasalahan di dunia baik dibidang ekonomi maupun politik.

Teori Stabilitas Hegemoni dan Potret AS Sebagai Negara Hegemon

Istilah Hegemoni berasal dari Yunani kuno 'hegemonia' yang berusaha mengekspresikan status dominan dan opresif dari satu elemen dalam sistem terhadap lainnya. Terdapat berbagai pendapat mengenai konsep hegemoni dari beberapa cendekiawan. Antonio Gramsci berpandangan bahwa hegemoni mewakili sebuah status dari negara yang paling kuat dalam suatu sistem internasional atau posisi dominan suatu negara dalam suatu regional. Lebih lanjut lagi, Gramsci menambahkan bahwa hegemoni memerlukan 'cooperation ensured by force' yang merupakan kombinasi supervisi politik dan sosial, serta persetujuan dan pasukan. Sedangkan Robert W. Cox berpendapat bahwa hegemoni memungkinkan negara dominan untuk menyebarkan nilai-nilai moral, politik, dan budaya terhadap masyarakat dan komunitas kecil melalui institusi komunitas sosial. Hegemoni memproduksi sistem sosial dan politik untuk diaplikasikan terhadap negara yang ditargetkan. Nye percaya bahwa negara superpower menjadi negara hegemoni dengan cara bersikap persuasif dalam suatu kerjasama. Persuasi tersebut diyakinkan oleh pemanfaatan *softpower* yang membuat negara lain mempercayai pentingnya kepentingan bersama (Yilmaz, 2010).

Terdapat determinan umum yang menjelaskan ciri-ciri dari kekuatan hegemon seperti; keefektifan unit mata uang dalam arena internasional, postur militer yang besar dalam aliansi dan memiliki pangkalan militer di berbagai negara di dunia, kepemimpinan dalam krisis dan konflik regional, memiliki senjata nuklir, kapasitas persuasi terhadap bangsa lain, legitimasi status dengan cara menyebarkan standar kehidupan dan nilai-nilai budayanya keseluruh dunia. Susan Strange mengklaim bahwa kekuatan structural tergantung pada empat elemen. Dalam ekonomi politik internasional, bangsa yang memiliki kelebihan elemen-elemen ini terhadap negara-negara lainnya, dapat disebut sebagai negara yang paling kuat. Elemen-elemen tersebut adalah :

- (1) *Maintaining the capability to influence the other states through threats, defense, denial or escalation of violence.*
- (2) *Keeping in hand the control of goods and service production systems.*
- (3) *Holding the authority of determination and management possibilities in finance and credit institutions.*
- (4) *Retaining the most effective instruments to influence the knowledge and informatics either technically or religiously*

through acquiring, production, and communication.(Strange dalam Yilmaz, 2010)

Joseph S. Nye menjelaskan sumber kekuatan hegemoni diperoleh dari; (1) Kepemimpinan dalam bidang teknologi, (2) Supremasi dalam bidang ekonomi dan militer, (3) Softpower, (4) kontrol terhadap pusat hubungan jaringan komunikasi internasional (Nye dalam Yilmaz 2010). Konsep hegemoni telah dikaji dalam berbagai cara yang berbeda, namun sama-sama memiliki poin mengenai posisi dari satu kekuatan di dalam dan seluruh sistem internasional.

Setelah mengetahui definisi dari konsep hegemoni sebagai pengertian dasar untuk memahami teori stabilitas hegemoni, dimana teori ini akan digunakan untuk menganalisis perilaku kebijakan AS dalam sistem ekonomi dan politik internasional. Robert Gilpin merupakan salah satu cendekiawan yang mengembangkan konsep hegemonic stability. Menurutnya, politik dunia dikarakteristikan oleh perjuangan dari entitas politik untuk memperoleh kekuatan, prestise, dan kekayaan dalam kondisi anarki global. Perhatian Gilpin berfokus pada dominasi negara dalam sistem atau hegemon yang memiliki kemampuan untuk membantu stabilitas dan kepemimpinan berdasarkan kekuatan ekonomi dan militernya. Negara tersebut dapat membuat peraturan yang mengatur transaksi ekonomi dan mengamankan investasinya di luar negeri. Namun, kekuatan lain juga mendapat keuntungan dari pemeliharaan status quo. Stabilitas sistem terancam ketika negara hegemon tersebut kehilangan posisi dominannya (Kohout, 2003).

Terdapat dua perspektif yang digunakan untuk menjelaskan teori stabilitas hegemoni. Pertama, yaitu pandangan neorealist. Pandangan neorealis ini digunakan oleh Robert Gilpin untuk menjelaskan perilaku *hegemonic stability* dalam kerjasama internasional. Demokrasi liberal kapitalis melakukan kerjasama dan perdagangan internasional untuk tujuan superioritas dominasinya. Peraturan dapat didirikan dalam sistem yang anarki melalui kekuatan dominasi suatu hegemon. Peran fundamental dari hegemon ini adalah untuk mengamankan sistem internasional dengan pengaruh besar kekuatan militernya dan secara pasif mendorong negara lain untuk bekerja sama. Kekuatan hegemon ini akan menggunakan pengaruhnya dan mengubah sistem interdependensi untuk keuntungannya sendiri. Berdasarkan asumsi ini, negara hegemon tersebut akan bekerja sama negara lain jika mereka melihat kelemahannya dapat dilengkapi melalui kerjasama. Kedua, yaitu pandangan liberalis. Para liberalis lebih memiliki sikap optimis. Liberalis setuju dengan asumsi neorealist bahwa sistem dapat distabilkan oleh satu negara negara hegemon dominan yang mengatur peraturan pada sistem, institusi dan kerjasama antar negara. Bedanya, asumsi liberalis lebih menekankan pada penggunaan softpower. Hegemon akan menggunakan kekuatan koersif ekonomi dan politik untuk mendorong negara yang lebih lemah agar bergabung dalam kerjasama, dimotivasi oleh legitimasi dan keuntungan bersama (Rudberg, n.d).

Dengan memperhatikan kembali sejarah dunia, kekuatan negara-negara barat terutama AS sudah tidak diragukan lagi kekuatan dan pengaruhnya di panggung global. Berdasarkan determinan kriteria kekuatan hegemon yang telah dijelaskan diatas, AS memiliki kapasitas sebagai negara hegemon dari struktur kekuatannya keamanan, produksi, keuangan, dan kapasitas pengetahuan dalam ekonomi politik internasional melebihi negara-negara lainnya (Yilmaz, 2010). Charles Kindleberger dalam teori stabilitas hegemoni-nya menjelaskan posisi AS di tahun 1970-1980an berdasarkan asumsi neorealis. Menurut analisisnya, AS telah memainkan peran untuk menstabilkan sistem internasional, terutama dalam bidang finansial internasional (Higgot dan Beeson, 2003). Ketika Perang Dingin berakhir, AS semakin terkukuhkan kekuatannya

dimata dunia sebagai negara *superpower*. Sistem kapitalis dan demokrasi dipercaya oleh berbagai negara sebagai sistem yang paling berhasil untuk pertumbuhan ekonomi domestiknya dengan melibatkan diri pada pasar bebas dan meliberalisasi ekonomi negaranya. Tahun 1990-an ditandai dengan munculnya banyak FTA, Maastricht Treaty, WTO, civil war di Kroasia hingga War on terrorism merupakan fenomena-fenomena yang sangat berhubungan dengan pengaruh sistem kapitalis dan demokrasi AS. Berdasarkan kriteria kekuatan hegemon yang dimiliki AS dengan analisis teori stabilitas hegemoni, diperoleh kesimpulan bahwa untuk menjaga stabilitas sistem internasional diperlukan kekuatan hegemon untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi dunia. Potret AS sebagai negara hegemon memungkinkan tindakan dan kebijakan luar negerinya mendapat legalitas untuk mengambil kendali atau mempengaruhi negara lain agar memperjuangkan ide tujuan bersama yang dipelopori negara hegemon. Dengan kekuatan militernya yang besar, AS baik secara independen maupun melalui institusi internasional, bisa melakukan intervensi terhadap negara yang sedang terkena krisis ekonomi atau keamanan.

Stabilitas Hegemoni AS Pada Awal Era Pasca Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya kekaisaran Soviet telah mendorong gelombang demokrasi dan keterbukaan pasar. Pada 1990-an terdapat beberapa perubahan strategi hegemonik AS yang tampak jelas pada pasca Perang Dingin. Daya tarik sistem ekonomi global, lembaga-lembaga internasional dan demokrasi untuk mendorong negara-negara yang semula tertutup untuk secara bertahap mengubah perilaku mereka. Banyak yang berpendapat bahwa ekonomi, politik, dan budaya lebih penting daripada kekuatan militer di dunia pasca-Perang Dingin. Globalisasi sering dihubungkan dengan Amerikanisasi. Lembaga multilateral, seperti IMF, WTO, APEC, dll juga berkontribusi pada penyebaran global kapitalisme dan demokrasi. Meskipun sistem Soviet telah runtuh, pasukan AS tetap memiliki pangkalan di Eropa, Asia Timur dan Timur Tengah. Intervensi militer AS terhadap suatu konflik baik secara langsung dan tidak langsung mewarnai fenomena sepanjang periode pasca Perang Dingin.

Dalam Perang Teluk, Haiti, Bosnia dan Kosovo, Amerika Serikat bisa menggunakan kemampuan militernya untuk bergabung dengan sekutunya dan melakukan intervensi dengan tujuan misi kemanusiaan. Dukungan NATO untuk kemerdekaan Bosnia karena empati dengan Bosnia atau permusuhan ke Yugoslavia yang menolak untuk bergabung dengan dunia barat di perpanjangan dari politik, militer, kontrol sosial dan ekonomi seluruh Eropa. AS - Adriatic Charter yang didirikan pada tahun 2003 sebagai inisiatif regional untuk mengatasi tantangan-tantangan keamanan bersama dan meningkatkan integrasi Euro-Atlantik di kawasan tersebut, dan telah disetujui oleh negara-negara Balkan(Alternativeinsight.com).

Setelah Perang Teluk berakhir, PBB memilih Sekretaris Jendral yang baru, Boutros-Boutros Ghali (sekaligus memilih Presiden Amerika Serikat yang baru); suara warga Amerika Serikat akhirnya memilih Presiden William Jefferson Clinton; dan diikuti dengan beragam kebijakan PBB yang banyak memasukkan unsur penggunaan senjata. Bagi Sekjen yang baru dan banyak pemerintahan, penjaga perdamaian PBB menjadi metode baru terhadap pilihan dalam penyelesaian konflik. Jumlah, variasi, dan ruang lingkup operasi penjaga perdamaian meningkat dengan pesat. Operasi-operasi yang dijalankan banyak melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam intervensi-intervensi termasuk intervensi internal negara-negara anggota, dibawah prinsip-prinsip baru yang implikasi-implikasinya justru jarang dieksplorasi. Ketidakstabilan situasi pasca Perang Dingin, antusiasme pemerintahan Clinton terhadap aktivitas multinasional dan ekspansi birokrasi serta perubahan doktrin

penjaga perdamaian menjadi ekspansi yang dramatis bagi pengembangan PBB berdasarkan pandangan-pandangan baru mengenai fungsi yang tepat untuk diemban oleh negara-negara, organisasi regional, dan PBB (Nizmi, 2013).

Pada akhir November 1992, dua bulan sebelum mengakhiri jabatan presiden Amerika Serikat, Bush memutuskan untuk terlibat di Somalia dengan skala yang lebih besar. Setelah Menteri Luar Negeri Larry Eagleburger meyakinkan Presiden bahwa operasi Somalia akan menjadi ganda. Bush memutuskan untuk bergerak cepat menangani persoalan kelaparan dan Eagleburger secara informal meyakinkan PBB bahwa Amerika Serikat siap untuk memimpin operasi pengiriman bantuan makanan ke Somalia. Hasilnya adalah Amerika Serikat memimpin operasi "penjaga perdamaian" yang dimulai dengan sebutan operasi "Operation Restore Hope" dan akhirnya dikenal dengan the United Task Force (UNITAF), yang membawa Amerika Serikat dan PBB terlibat dalam persoalan Somalia. Bush mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memimpin koalisi internasional sebagaimana tertera dalam pasal VII yang memberikan wewenang kepada tentara-tentara Amerika. Serikat untuk melindungi diri mereka dengan cara yang efektif. Bush membatasi kepemimpinannya, dan menyatakan bahwa program kemanusiaan yang dipimpinnya bertujuan jelas yakni membuka jalur suplai makanan, untuk mempercepat sampainya bantuan makanan dan mempersiapkan cara bagi penjaga perdamaian PBB agar tetap menjalankan misi kemanusiaan. Misi ini tidak berakhir sebelum bantuan makanan benar-benar telah diterima oleh masyarakat Somalia (Nizmi, 2013).

Masalah nuklir juga tidak menghilang bersama dengan Uni Soviet. Senjata nuklir dan pemusnah massal lainnya tetap menjadi agenda dari kebijakan luar negeri Amerika. AS mendapat tantangan dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. AS beberapa kali berusaha untuk memberikan sanksi dan diplomasi dengan Korut, namun belum mencapai resolusi hingga saat ini. Posisi AS baik dalam bidang politik maupun ekonominya masih sangat penting di dunia. Korea Selatan dan Jepang misalnya, masih sangat membutuhkan dukungan militer AS untuk menjamin keamanan negara mereka terutama terhadap nuklir Korea utara. AS juga terlibat dalam berbagai kerjasama perdagangan bebas dengan berbagai negara baik secara bilateral maupun dalam bidang keamanan.

Lembaga ekonomi internasional yang paling sering disebutkan dalam konteks globalisasi ekonomi adalah IMF, Bank Dunia, dan WTO. Ketiga lembaga memiliki posisi istimewa untuk membuat dan menegakkan aturan ekonomi global. Sebagaimana disebutkan di atas, IMF dan Bank Dunia muncul dari sistem Bretton Woods. Dimulai pada tahun 1970-an, terutama setelah jatuhnya Uni Soviet, agenda ekonomi IMF dan Bank Dunia telah disinkronkan dengan kepentingan neoliberal untuk mengintegrasikan dan deregulasi pasar di seluruh dunia. Tujuan resmi dari peminjaman dana yaitu untuk mereformasi mekanisme ekonomi internal negara debitur di negara berkembang sehingga mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membayar utang yang telah dikeluarkan. Namun, pada prakteknya, ketentuan program terbilang mengarah ke bentuk baru kolonialisme. Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan di IMF dan Bank Dunia. Sebagian besar dari 'pinjaman pembangunan' yang diberikan oleh lembaga-lembaga ini telah baik telah dikantongi oleh para pemimpin politik atau untuk memperkaya bisnis lokal dan perusahaan-perusahaan negara Utara. Pada kenyataannya, iming-iming pinjaman luar negeri untuk modernisasi dan peningkatan daya saing negara debitur hanya semakin membuat mereka menderita karena pemerintah harus melakukan pemotongan belanja publik untuk program-program seperti, pendidikan, pencemaran lingkungan, dan kemiskinan untuk mengangsur pinjaman (Manfred, 2008). Beberapa contoh kasus

diatas menunjukkan bahwa perilaku dan kebijakan AS dalam menjaga stabilitas sistem internasional melalui kelebihan dari kekuatan militer dan pengaruhnya dalam ekonomi politik internasional.

Stabilitas Hegemoni AS Pada *War on Terrorism*

Peluncuran Global War on Teror (GWOT) setelah serangan 11 September 2001 telah diprediksi secara mendasar dalam perubahan program bantuan luar negeri AS. Secara khusus, ada harapan umum bahwa bantuan pembangunan akan digunakan untuk mendukung startegi sekutu dalam GWOT. Segera setelah 9/11, AS mampu menarik simpati internasional secara luas dan mampu memperoleh dukungan PBB dan sekutu untuk menyerang kamp-kamp pelatihan teroris di Afghanistan dan bahkan di rezim Taliban yang melindungi mereka. Namun dalam semangat untuk menyebarkan Perang terhadap Terorisme, pemerintahan Bush segera menya-nyia-nyiakkan niat baik dukungan internasional yang luas ini. Ketika pemerintahan Bush tidak mampu untuk mendapatkan dukungan internasional yang luas atau resolusi PBB mendukung rencana untuk menyerang Irak (Florig, n,d).

Melakukan intervensi militer ke negara lain, meski tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, bukan hal baru bagi Amerika. Setelah Perang Vietnam (1959-1975), Amerika terlibat dalam beberapa intervensi militer. Pada misinya yang mengatasnamakan perang terhadap teorisme, AS kembali melakukan sejumlah aksi intervensi tanpa seizin dari DK PBB. Bulan Oktober 2001, tanpa persetujuan PBB, AS menyerang Afganistan karena dianggap melindungi Al-Qaidah, pihak yang dituding sebagai pelaku serangan 11 September 2001 ke New York. Maret 2003, Presiden George W. Bush melakukan aksi militer sepihak ke Irak. Bersamaan dengan pemboman di Irak, Amerika Serikat juga melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap jaringan Al Qaeda di Afganistan Selatan. Posisi pejuang Taliban di kota Kandahar juga dihujan bom. Operasi AS ini melibatkan sedikitnya seribu serdadu. Inilah serangan militer terbesar di Afganistan sejak setahun. Operasi ini bertujuan mencegah aksi-aksi balas dendam. Pusat komando pasukan PBB di ibukota Kabul dikerahkan siap siaga. Karyawan PBB di Afganistan diimbau tidak keluar pos mereka selama 48 jam (mail-archive.com,2003).

Presiden Irak Saddam Hussein akhirnya jatuh dan AS resmi keluar dari Irak pada akhir 2011. Kemudian, Sejak 2002, AS secara rutin menggunakan drone (pesawat tanpa awak) Predator untuk membunuh teroris di Pakistan, Yaman, dan Somalia. Pada Maret 2011, dipimpin Prancis dan Inggris, dengan bantuan AS, operasi militer dilakukan di Libya. Misi itu berakhir setelah presiden Libya Muammar Khadafi tewas Oktober 2011 (duniatempo.com, 2013). Dalam harian hidayatullah.com, Presiden AS Barack Obama, membela keterlibatan AS dalam intervensi militer melawan rezim Muammar Qadhafi di Libya. Ia mengatakan, dunia akan lebih baik tanpa Qadhafi yang memegang kekuasaan, menurunkannya melalui kekerasan akan menjadi kesalahan. Pernyataan Obama itu disampaikan dalam pidatonya di televisi kepada anggota militer di National Defence University di Washington Senin malam. Obama mengatakan ia tidak mau menjadi presiden yang hanya menunggu gambar-gambar pembantaian penduduk tanpa mengambil tindakan. Obama mengatakan kampanye udara yang di pimpin Barat telah menghentikan kepentingan Qadhafi dan menghentikan pembantaian yang mengguncang kestabilan dari seluruh daerah. AS berinisiatif untuk mengambil kepemimpinan dalam tindakan militer yang dipimpin Barat melawan Qadhafi, sebelum NATO menyetujui untuk mengambil alih operasi tersebut.

Selain intervensi-intervensi militer, AS juga menerapkan strategi pemberian dana asing atau USAID kepada negara yang diduga rawan teroris, salah satunya kepada Pakistan. AS memberikan menjalin kerjasama dengan Pakistan dalam berbagai cara seperti memberi tunjangan fasilitas logistik, berbagi intelijen, dan menangkap atau menyerahkan teroris Al-Qaidah. Pakistan merupakan negara partner AS dalam misi War on Terrorism dengan jumlah korban meninggal terbanyak, meskipun negara tersebut kacau, namun negar ini belum dikategorikan sebagai *failed state*. AS menyarankan Pakistan untuk melakukan liberalisasi budaya dan menerapkan sistem yang lebih demokratis untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan politik domestiknya. Program bantuan AS terhadap Pakistan fokus pada strategi pengurangan kemiskinan. Terdapat persepsi apabila kemiskinan di Pakistan meningkat, kekhawatiran tentang meningkatnya inflasi, dan ketidakpuasan akan tumbuh dan mendominasi lembaga sipil, serta sejumlah ketegangan internal lainnya. Kemampuan Amerika Serikat untuk membantu reformasi Pakistan akan diperkuat jika Amerika Serikat tampaknya kurang membutuhkan Pakistan dari Pakistan membutuhkan Amerika. Kepentingan AS melampaui perang melawan terorisme. Dengan pengeluaran modal politik dalam mengamankan kerjasama Pakistan dalam misi tersebut, Amerika Serikat berisiko mengurangi pemulihan hubungan dengan Pakistan dan mengabaikan tujuan strategis penting lainnya, seperti mempromosikan demokrasi di Pakistan dan proliferasi nuklir. Setiap kenaikan tingkat yang ada bantuan keamanan, atau penjualan lebih lanjut alutsista besar di luar F-16, harus dikaitkan dengan kerjasama Pakistan terhadap isu-isu ini, serta pada perang melawan terorisme (Hussain, 2005).

Kepentingan AS di masa mendatang di wilayah tersebut bertujuan untuk mencegah tidak hanya oleh strategi bayangan bangkit kembali China, tetapi juga dari India dan mungkin dari Rusia. Selain itu juga ada risiko peningkatan Islam radikal di wilayah ini yang didorong runtuhnya rezim yang represif dan kuat. China sudah memposisikan diri untuk mengisi kekosongan kekuasaan di masa depan yang disebabkan oleh menurunnya kehadiran AS di wilayah tersebut. China telah mulai membangun jembatan dengan Iran dan India. Akibatnya, hubungan AS - Pakistan akan semakin bersinggungan dengan isu-isu yang jauh melampaui perang melawan terorisme. Oleh karena itu ada alasan yang kuat bagi Amerika Serikat untuk tetap terlibat dalam wilayah tersebut. Bantuan AS baik tunjangan USAID maupun bentuk bantuan lainnya sangat penting sebagai instrument untuk menjaga hubungan dengan Pakistan agar tetap dibawah pengaruhnya dan yang lebih penting, yaitu untuk mencegah penyebaran terorisme (Hussain, 2005).

Kesimpulan

Berdasarkan determinan kriteria hegemon, AS memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara hegemon. Ketika Perang Dingin berakhir, AS menjadi negara hegemon satu-satunya yang memiliki superioritas dalam ideologi serta kekuatan militernya. Oleh karena itu, Pasca Perang Dingin, sistem kapitalis, demokrasi dan globalisasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Sistem ini dipercaya sebagai produk superior barat yang dapat mengantarkan pada kesejahteraan ekonomi. Dalam segi keamanan, AS terlibat dalam upaya misi perdamaian dan kemanusiaan. Analisa teori stabilitas hegemoni mengantarkan pada kesimpulan bahwa untuk menjaga stabilitas sistem internasional diperlukan kekuatan hegemon untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi dunia. Potret AS sebagai negara hegemon memungkinkan tindakan dan kebijakan luar negerinya mendapat legalitas untuk mengambil kendali atau mempengaruhi negara lain agar memperjuangkan ide tujuan bersama yang dipelopori negara hegemon Kebijakan stabilitas hegemoni AS setelah peristiwa 9/11 mendapat

tantangan yang besar. Kebijakan AS dalam War on Terrorism masih menunjukkan peran kuatnya sebagai negara hegemon, yaitu melalui invasi dan intervensi ke wilayah Timur Tengah. Meskipun kekuatan AS mulai tersaingi dengan pertumbuhan pesat perekonomian China dan India, kekuatan militer serta pengaruh AS di sistem internasional masih memiliki posisi yang tinggi. Hal tersebut masih menunjukkan perilaku

Referensi

Artikel Online

_____, *Cold War Lesson #5: The End of the Cold War (1979 – 1991)*, (Online) tersedia di <http://historyblueprint.org/CWAW5EndoftheColdWar.pdf> diakses pada 23 Mei 2015

Conteh-Morgan, Earl. n.d. *International Intervention: Conflict, Economic Dislocation, And The Hegemonic Role Of Dominant Actor*, (Online) tersedia di http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol6_2/Conteh-Morgan.htm diakses pada 23 Mei 2015

_____, 2013. Inilah Intervensi Militer AS Paska Perang Vietnam. <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/09/01/116509275/Inilah-Intervensi-Militer-AS-Paska-Perang-Vietnam>. diakses pada 25 Mei 2015

_____, 2003. *Warta Berita Radio Nederland Wereldomroep*. (Online) tersedia di <https://www.mail-archive.com/berita@rnw.nl/msg00875.html> diakses pada 25 Mei 2015

B. Steger, Manfred. 2008. *Globalization: A Very Short Introduction: Chapter 3*. New York : Oxford University Press

Yilmaz, Sait. 2010. *State, Power, and Hegemony*. *International Journal of Business and Social Science*

Rudberg, Vilhelm. N,d . *Understanding China's New Assertiveness: A Dyadic Study of China's Rise, its Goals and Implications*. Lund University.

Kohout, Franz. 2003. *Cyclical, Hegemonic, and Pluralistic Theories of International Relations: Some Comparative Reflections on War Causation*. *International Political Science Review*

Hussain, Touqir. 2005. *U.S.-Pakistan Engagement The War on Terrorism and Beyond*. Washington Dc : USIP.